

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup atau bab yang terakhir ini, saya ingin menyimpulkan yang berisikan hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan, adapun posisi penulis dalam skripsi ini hanya menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas fenomena yang terjadi dengan apa adanya karena sesuai dengan metode dan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan merangkai kenyataan menjadi suatu cerita (narasi), yang menguraikan secara teratur suatu masalah keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya ukan bagaimana seharusnya, adapun yang dapat saya simpulkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1952 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina, pendirinya adalah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Proses sejarah lahirnya Hizbut Tahrir terbentuk saat beliau belajar di Al-Azhar, ia adalah mahasiswa yang vokal menyuarakan kritik-kritik. Pada saat itu, Taqiyuddin mulai merencanakan untuk melakukan pergerakan revolusioner untuk menentang Inggris dan Yahudi. Apalagi ditambah dengan jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi pada tahun 1948. Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya; setidaknya sejak 1949 ketika beliau masih menjabat Qadhi di al-Quds. Pada tahun 1950 beliau merilis buku beliau yang pertama yaitu *Inqadz Filisthin* (Membebaskan Palestina). Fakta-fakta

sosio-historis dari sang pendiri Hizbut Tahrir inilah nantinya akan memperlihatkan pengaruhnya dalam organisasi dan pemikiran Hizbut Tahrir yang dipimpinya. Realitas historis yang dimiliki oleh Taqiyuddin Nabhani menjadikannya sangat anti Barat karena imperialisme dan sekularisasi masyarakat di zamannya.

Kedua, Prinsip dasar organisasi HT bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem *khilafah* dan menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah di dalam realita. Sedangkan strategi perjuangan HTI melalui tiga tahapan: **pertama**, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah At Tatsqif), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka gerakan; **kedua**, Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan ; dan **ketiga**, Tahapan Penerimaan Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukmi), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Berdasarkan tipologi gerakan yang diungkapkan Aberle maka Hizbut Tahrir Indonesia dapat digolongkan sebagai Gerakan Sosial Revolusioner karena ingin menciptakan dan mengembalikan tatanan dunia kembali ke sistem Islam yaitu khilafah. HTI akan berpijak dan berlandaskan serta mentransormasikan

nilai-nilai Islam dalam menciptakan tatanan tersebut. Strategi perjuangan HTI memperlihatkan bahwa gerakan ini lebih revolusioner. Sebuah pandangan bahwa penerapan syariat Islam tidak boleh melalui pentahapan terlebih dahulu tetapi harus sekaligus. Secara umum aliran pemikiran dalam Islam, pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki kecenderungan lebih dekat dengan pandangan kaum revivalis dilihat dari pandangan bahwa kebangkitan Islam harus dimulai dari dalam diri Islam sendiri tanpa harus mengambil nilai-nilai kebudayaan Barat serta berpartisipasi dalam sistem bentukkan Barat.

Ketiga, Berdasarkan penerimaan terhadap demokrasi sebagaimana dalam buku Yusuf Al-Qardhawi. HTI termasuk dalam golongan menolak terhadap demokrasi atas nama Islam. Karena HTI melihat demokrasi adalah suatu sistem dan pandangan hidup Barat yang tidak sesuai dengan Islam bahkan demokrasi itu sendiri bersumber dari manusia dan tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama. Oleh karenanya, menurut HTI menganggap demokrasi adalah sistem kufur yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam sehingga dilarang mengadopsi sistem tersebut.

Pada aspek kedaulatan rakyat, HTI menolak aspek tersebut karena kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan syariah bukan di tangan manusia, kemudian kekuasaan yang berada di tangan umat/rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariah.

Pada aspek pemilihan umum, HTI melihat bahwa dengan adanya pemilu seorang yang tidak berkompeten atau bisa dikenal seorang jahil akan mencalonkan diri dengan memanfaatkan sumber daya finansial yang dimiliki

untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara apapun, dan visi misi calon seringkali bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam bahkan tidak berupaya untuk menegakkan hukum Islam dan ketika pemilu berakhir menghasilkan orang-orang yang membuat hukum sendiri menafikan hukum Allah.

Pada aspek kebebasan sipil, HTI demokrasi tidak memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap komponen-komponen tersebut sehingga ini bertentangan dengan syariah.

Keempat, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki platform dan agenda perjuangan yang tidak sejalan dengan konsep atau ideologi demokrasi karena Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam yang dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan *Khilafah Islamiyah* dengan bertopang kepada *fikrah* (ide) sebagai sarana yang paling pokok dalam perubahan. Hizbut Tahrir juga berupaya membangkitkan kembali umat Islam dari hukum-hukum kufur yang tidak berasal dari Islam.

Itulah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, menarik untuk dijadikan kajian lebih lanjut.

B. Rekomendasi

Dalam rekomendasi ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, HTI tertutup dalam hal struktur organisasi. Menurut HTI itu sendiri kerahasiaan ini dilakukan untuk menjaga keutuhan organisasi danantisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oleh karenanya,

menurut penulis sebaiknya HTI juga bisa terbuka dalam hal struktur organisasi seperti halnya dalam pemikiran mereka, mereka terbuka. Karena kalau melihat gerakan islam lain, mereka terbuka baik struktur maupun pemikiran dan keutuhan organisasinya tetap terjaga.

Kedua, HTI menolak demokrasi beserta aspek-aspek maupun unsur-unsur yang ada dalam demokrasi. Rekomendasi saya HTI seharusnya memberikan jalan alternatif lain yang terlepas dari demokrasi. HTI harus memberikan kontribusi diluar demokrasi karena untuk mencapai titik kekuasaan tidak mungkin terlepas dari pemilihan umum melalui keterwakilan wakil sebagaimana diungkapkan oleh Hasan Al-Banna untuk mencapai untuk mencapai titik puncak khilafah maka harus ada pembentukan yang bertahap, mulai dari pembentukan pribadi muslim, pembentukan keluarga muslim, pembentukan bangsa muslim, pembentukan pemerintahan muslim, dan yang paling akhir pembentukan negara muslim yang memimpin negara-negara muslim, menyatukan wilayah-wilayah kaum muslimin dan mengembalikan bumi mereka yang hilang, tanah air mereka yang terampas dan negara mereka yang terhempas kemudian mengasung panji jihad dan bendera dakwah kepada Allah sampai dunia bahagia berkat Islam.

Oleh karena itu sebagai penutup dalam tulisan ini penulis merekomendasikan kepada peneliti lain melakukan penelitian lanjutan yaitu adanya kajian yang lebih mendalam dalam perbandingan gerakan Islam memandang konsep demokrasi yang bisa dilihat dari berbagai aspek. Menurut penulis tema tersebut sangat menarik untuk dijadikan suatu topik penulisan karena terjadi perbedaan pandangan diantara gerakan Islam dalam menyikapi demokrasi.